

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan bilateral maupun multilateral saat ini menjadi sesuatu yang wajar dalam mengikuti arus globalisasi. Adanya keterikatan antar negara ini bukanlah tanpa alasan atau semata-mata mencari untung, namun lebih dari itu dan seyogianya menyangkut kesejahteraan bangsa. Awal mula terjadinya sebuah hubungan bilateral maupun multilateral bisa terjadi jauh sebelum negara berdaulat, beberapa pemicu seperti kesamaan ekologis, perjalanan sejarah suatu negara, budaya, kesamaan atau perbedaan sumber daya alam, kemampuan ekonomi dan militerpun sangat mempengaruhi bagaimana perilaku suatu negara terhadap negara lain. Selain itu, hubungan bilateral dan multilateral bisa terjadi karena adanya kepentingan aktor maupun kepentingan nasional, tergantung bagaimana sikap, langkah-langkah serta kebijakan elit-elit politik luar negeri saat itu. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa tidak ada yang dapat hidup sendiri, keterbatasan sumber daya alam maupun sumber daya manusia menjadi sebab yang sangat mendasar. Kebijakan dan sikap yang elit politik internasional yang dibuat akan mempengaruhi pada kondisi nasional.

Indonesia sudah menjalin hubungan bilateral dengan negara-negara lain, salah satunya adalah Cina. Diperkirakan hubungan antara keduanya ini sudah terjalin sejak abad pertama. Bukan hanya terjadi karena adanya hubungan dagang kala itu antara

bangsa Tionghoa dengan Nusantara, namun karena ada hubungan Tributer juga yang terjalin.¹

Tahun 1950, ketika Moh. Hatta menjadi perdana menteri Indonesia, adalah pernyataan resmi bahwa Indonesia mengakui Cina sebagai negara komunis. Cina yang memang sebagai negara dagang, sejak awal kepemimpinan Soekarno dapat memberikan pengaruh besar pada Indonesia kala itu. Konferensi Asia-Afrika sebagai jembatan yang baik untuk memulai hubungan keduanya. Keinginan Soekarno untuk menjadi pimpinan Gerakan *Non-Block* membawa kemudahan terhadap hubungan Indonesia dengan Cina yang dipimpin oleh Mao Zedong pada tahun 1949-1976. Soekarno dan Mao Zedong sama-sama memiliki ambisi di mana mereka menginginkan untuk membentuk kekuatan revolusioner yang tidak bergantung pada blok barat (Amerika Serikat) dan blok timur (Uni Soviet). Wajar saja karena keduanya pernah mengalami masa-masa buruk selama dijajah oleh Barat dan Jepang.² Terlebih lagi kala Perdana Menteri Cina, Chou En Lai telah mengungkapkan keinginan Cina membentuk “Blok Asiatik” yang dipelopori oleh Cina, Korea Utara, Kamboja, Vietnam Utara dan Indonesia. Maka tidak heran apabila saat itu Cina mendukung betul adanya perang ideologi yang sedang terjadi.³

Sejarah terjalinnya hubungan bilateral antara Indonesia dengan Cina memang panjang. Perjalanan sejarahnya dengan Indonesia membuat kedekatan antara keduanya

¹ Liang Liji, *Dari Relasi Upeti ke Mitra Strategis* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2012)

² Tjhin, Christine. 2002. Analisa Penelitian dari *Center for Strategic and International Studies (CSIS)*, dalam <https://www.viva.co.id/arsip/1912-g30s-dan-masa-suram-hubungan-ri-rrc> diakses pada tanggal 5 Januari 2020.

³ Liang Liji, op.cit.

semakin erat, terlebih lagi kala Indonesia terlibat pada tahun 2001 dalam kesepakatan ACFTA (*ASEAN-China Free Trade Area*) ditandatangani bersama pada KTT ASEAN di Vientiane, Laos.⁴ Kerangka kerjasama ACFTA ini berawal dari kerjasama sebelumnya yaitu *ASEAN plus 3* (Jepang, Cina, Korea Selatan). *ASEAN-China Free Trade Area* ini adalah usaha Cina untuk meliberalisasi perekonomian ASEAN dalam rangka membuka peluang jejaring perekonomian yang lebih luas dengan membebaskan harga masuk barang dari luar negeri.⁵ Kerjasama ini diharapkan dapat membantu negara-negara ASEAN yang notabene sedang melakukan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan daya saing ekonomi di kancah Internasional terutama Indonesia. Investasi dari Cina diharapkan akan mempercepat pembangunan infrastruktur di negara-negara ASEAN tersebut. Dan pada tahun 2010 diharapkan dapat sepenuhnya terealisasi, dan menjadi pangsa pasar yang baik bagi negara-negara yang menandatangani.

Dalam Pertemuan Komisi Bersama atau *Joint Commission Meeting* yang ke 10 (3 April 2010), menjadi pertemuan yang menjadi tindak lanjut dari ACFTA yang dilakukan Indonesia dengan Cina. JMC ini forum yang menghasilkan tujuh kesepakatan mengenai isu perdagangan investasi, kerjasama keuangan dan pembangunan. Diantaranya adalah: **Pertama**, pihak Cina sepakat untuk memfasilitasi akses pasar bagi beberapa buah tropis dan sarang burung walet; **Kedua**, membentuk

⁴ ASEAN. 2001. *Agreement on Investment of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between the Association of the Southeast Asian Nations and the People's Republic of China*.

⁵ Afadlal, Annisa, Ratna, dkk. *Ekonomi Politik Kemitraan ASEAN: Sebuah Potrer Kerjasama*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).

Kelompok Kerja Resolusi Perdagangan (*Working Group on Trade Resolution*); **Ketiga** membuka cabang Bank Mandiri di RRT; **Keempat**, Cina memberikan pinjaman ke Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), sebagai fasilitas kredit untuk mendukung perusahaan di kedua negara terkait proyek perdagangan dan investasi; **Kelima**, kedua negara memaksimalkan penggunaan Pinjaman Kredit Ekspor Preferensial (*Preferential Exsport Buyers Credit*) dan Pinjaman Koneksi Pemerintah (*Government Concessial Loan*); **Keenam**, menyelesaikan Perjanjian Perluasan dan Pendalaman Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan (*Agreement on Expanding and Deepening Bilateral Economic and Trade Cooperation*); **Ketujuh**, membahas *Agreed Minutes of the Meeting for Futher Strengthening Economic and Trade Cooperation* yang berisi tentang kemitraan strategis dan tindak lanjut implementasi ACFTA.⁶

Hasil dari kesepakatan ini tentu dapat memberikan efek pada kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Cina. Kebijakan untuk menurunkan bea cukai hingga 0-5% untuk barang-barang impor dari negara ASEAN dan Cina adalah salah satu cara agar dapat merealisasikan maksud dan tujuan dari perjanjian ACFTA ini. Berdasarkan penurunan bea cukai tersebut hasilnya dapat dilihat dari neraca dagang dari tahun 2014-2018 antara Indonesia dengan Cina:

⁶ Team VIVA. 2010. *ACFTA, RI-China Bikin Tujuh Kesepakatan*, dalam <https://www.viva.co.id/arsip/141259-acfta-ri-china-bikin-tujuh-kesepakatan> diakses pada 20 Maret 2020.

Tabel 1.
Neraca Perdagangan Indonesia-Tiongkok

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	Trend (%) 14-18	Jan-Agu		Perub. (%) 19/18
							2018	2019	
Total Perdagangan	48.230.279,90	44.457.320,90	47.591.263,50	58.849.932,50	72.670.066,40	11,63	47.028.964,10	45.917.707,30	-2,36
Migas	1.309.636,80	1.971.828,00	1.783.674,90	1.988.304,40	3.010.801,20	18,21	1.635.771,00	1.502.988,90	-8,12
Non Migas	46.920.643,20	42.485.492,90	45.807.588,70	56.861.619,20	69.659.265,20	11,42	45.393.193,20	44.414.718,40	-2,16
Ekspor	17.605.944,50	15.046.433,80	16.790.801,30	23.083.091,20	27.132.234,10	13,8	18.097.606,80	17.240.657,20	-4,74
Migas	1.146.855,30	1.785.748,80	1.672.752,50	1.733.417,20	2.724.143,70	18,54	1.489.287,60	1.292.906,50	-13,19
Non Migas	16.459.089,20	13.260.684,90	15.118.048,80	21.349.674,00	24.408.090,40	13,48	16.608.319,20	15.947.750,70	-3,98
Impor	30.624.335,50	29.410.887,10	30.800.462,30	35.766.832,30	45.537.832,30	10,4	28.931.357,30	28.677.050,10	-0,88
Migas	162.781,50	186.079,20	110.922,30	254.887,20	286.657,50	15,56	146.483,30	210.082,40	43,42
Non Migas	30.461.554,00	29.224.807,90	30.689.539,90	35.511.945,20	45.251.174,80	10,37	28.784.874,00	28.466.967,60	-1,1
Neraca Perdagangan	-13.018.391,00	-14.364.453,40	-14.009.661,00	-12.683.741,10	-18.405.598,20	5,85	-10.833.750,50	-11.436.392,90	-5,56
Migas	984.073,80	1.599.669,60	1.561.830,20	1.478.530,00	2.437.486,20	18,95	1.342.804,30	1.082.824,00	-19,36
Non Migas	-14.002.464,90	-15.964.123,00	-15.571.491,20	-14.162.271,20	-20.843.084,30	6,99	-12.176.554,80	-12.519.216,90	-2,81

Sumber: BPS, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi, Kementerian Perdagangan⁷

⁷ Pusat Data dan Sistem Informasi, Kementerian Perdagangan. 2019. Neraca Perdagangan Indonesia-Tiongkok, dalam <https://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/indonesia-export-import/indonesia-trade-balance> diakses pada 7 Oktober 2019.

Dapat dilihat dari tabel tersebut bahwasannya perdagangan antara Indonesia dengan Cina semakin besar tiap tahunnya. Yang artinya dari perdagangan antar dua negara ini adalah Indonesia yang mengalami defisit dagang yang semakin besar. Pada era Jokowi sejak tahun 2014 hingga pertengahan tahun 2018 tidak ada tanda-tanda bahwa Indonesia mengurangi defisit secara berarti. Ini bisa menandakan bahwa tingkat konsumerisme masyarakat yang tinggi akan barang-barang impor dibandingkan barang-barang lokal.

Beberapa faktor pendorong dari fenomena ini diantaranya adanya perjanjian ACFTA yang membebaskan bea cukai dari Cina hingga 0-5%,⁸ kebijakan ini berimbas pada membludaknya produk dari Cina. Kurang mampunya pengusaha lokal dalam menarik minat konsumen untuk membeli produk, barang-barang yang di ekspor berupa barang mentah yang kemudian diolah di luar negeri dan dijual kembali di Indonesia, memberikan keuntungan yang besar kepada Cina. Didin S. Damanhuri dalam bukunya menuliskan bahwa kondisi riil SDM di sektor pertanian saja secara menyeluruh masih jauh dari memadai, bisa karena petani memiliki tingkat Pendidikan yang rendah atau karena jumlah petani yang meningkat dengan lahan yang semakin sempit.⁹ Ini sudah cukup menjelaskan kenapa Indonesia bahkan mengimpor beberapa bahan pokok seperti beras, jagung, kedelai, dan lainnya. Disamping itu, perkembangan globalisasi yang cepat membuat *e-commerce* membludak, tingginya minat masyarakat untuk

⁸ Menteri Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 26/PMK 010/2017 Tentang Penerapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area* (Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2017).

⁹ Didin S. Damanhuri, *Ekonomi-Politik Indonesia dan Antarbangsa* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hal. 56.

membeli barang secara online menjadi pangsa pasar siapa saja termasuk Cina. Murahnya harga dengan kualitas yang baik membuat minat konsumen Indonesia tertarik, sehingga minat terhadap produk buatan lokal berkurang. Baru-baru ini pemerintah mengeluarkan peraturan tentang *e-commerce* sebagai upaya melindungi konsumen, pelaku usaha, serta untuk melindungi para pengusaha dalam negeri. Peraturan *e-commerce* ini ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 20 November 2019, Peraturan Pemerintah no. 80 tahun 2019.¹⁰

Indonesia seakan tidak bisa terlepas dari campur tangan negara asing, terutama Cina dalam kerjasama perekonomian. Banyak investasi asing yang berasal dari Cina sebagai upaya peningkatan PDB, perkembangan industri dan meningkatkan produksi nasional. Cina mampu memberikan kontribusinya secara penuh dalam agenda pembangunan Indonesia, terutama mengingat proyeknya sejalan dengan proyek BRI, dengan cara memberikan pinjaman dan lobi-lobi untuk memasukan pekerja Cina sebagai buruhnya. Menurut Bappenas dalam kurun 2015-2020 Indonesia memerlukan dana sebanyak 600 miliar dolar untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur, sebagai pendukung kelancaran perekonomian nasional. Sedangkan Indonesia sendiri hanya memiliki 25% dari total 600 miliar dolar tersebut. Untuk itu Indonesia membuka investasi besar besaran untuk memenuhi kekurangannya.¹¹

¹⁰ Yudho Winarto. 2019. *Peraturan Pemerintah (PP) soal e-commerce sudah terbit, ini detailnya*, dalam <https://nasional.kontan.co.id/news/peraturan-pemerintan-pp-soal-e-commerce-sudah-terbit-ini-detailnya?page=all> diakses pada 26 Januari 2020.

¹¹ Bambang Cipto, *Strategi China Merebut Status Super Power* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018) hal. 169.

Tercatat sejak tahun 2015 Indonesia telah mentandatangani MoU dengan Cina yang bersedia memberikan pinjaman sebanyak 3 miliar dolar untuk membiayai 52 proyek. Salah satu proyek yang telah terealisasi adalah pembangunan Pelabuhan Tanjung Sauh di Batam, proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, jalan tol Medan-Kuala Nemu Tebing Tinggi, dan yang lainnya. Kemudian pada Juni 2017 mentandatangani MoU senilai 1.63 miliar dolar, serta bulan April 2018 mentandatangani dua MoU dan lima kontrak kerja sama. Masalah utang-piutang lebih besar lagi konsekuensinya, banyak yang berasumsi bahwa mendapatkan utang dari Cina dalam skala besar merupakan *debt trap* yang akan merugikan negara penerima hutang.¹²

Salah satu yang terkena jebakan diplomasi *debt trap* ini adalah Sri Lanka yang tidak mampu membayar hutangnya karena sudah terlalu besar dan sudah masuk masa tenggang. Pada akhirnya Sri Lanka terpaksa menyerahkan Pelabuhan Hambatota Port sebagai proyek yang didanai oleh Cina itu kepada Cina sebagai penyelesaian utang.¹³ Ini merupakan contoh nyata bagi negara manapun yang menerima utang tanpa syarat dari Cina dan Indonesia harus hati-hati dengannya.

Setelah perjanjian ACFTA ditandatangani, segonyanya ini membawa keuntungan bagi Indonesia pula untuk memperluas jaringan dagang dan memperbesar kualitas maupun kuantitas produksi. Investasi asing juga tidak selamanya akan membawa banyak keuntungan pada Indonesia, terlebih jika ditinjau ulang investasi

¹² Bambang Cipto, op.cit hal. 169-171.

¹³ Defi Winarsih. 2019. *OBOR, Awas Debt Trap Cina*, dalam <https://www.voa-islam.com/read/citizens-jurnalism/2019/05/07/64044/obor-awas-debt-trap-cina/> diakses pada 26 Januari 2020.

asing ini akan membawa surplus lebih banyak bagi asing dan Indonesia lebih merugi. Meskipun investasi asing ini membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas, tapi tetap saja masyarakat pada akhirnya menjadi pekerjanya untuk memenuhi surplus bagi mereka dan lingkungan sekitar yang mendapatkan dampak langsung dari perusahaan-perusahaan industri asing. Belum lagi utang yang diberikan oleh Cina sangatlah besar dan bisa berdampak terjadi *debt trap*.

Peran pemerintah dalam mendorong dan mendukung kegiatan ekonomi dalam negeri maupun luar negeri sangat penting. Pentingnya pemenuhan kebutuhan dalam negeri dengan menggunakan sumber daya alam dan manusia dalam negeri sendiri sangat berpengaruh dalam menekan angka impor. Dan perlunya pembatasan atau proteksionisme sebagai peran pemerintah dalam melindungi produsen domestik. Untuk itu, menarik bagi penulis untuk mengetahui bagaimana hubungan Indonesia dengan Cina dari tahun 2014-2019, terutama dalam sektor ekonomi politiknya mengingat Cina sebagai mitra perdagangan utama bagi Indonesia serta memberikan banyak kontribusi dalam pembangunan infrastruktur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis menuliskan rumusan masalah sebagai berikut, bagaimana hubungan ekonomi politik Indonesia dengan Cina tahun 2014-2019?

C. Pembatasan Masalah

Adapun pembatasan masalah, yaitu mencari isu-isu dan kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Cina tahun 2014-2019. Yang mana berdasarkan kerjasama dan isu-isu yang tengah terjadi tersebut dicari seberapa

menguntungkan dan tingkat kerjasama ekonomi politik Indonesia dengan Cina. Diharapkan dengan pembatasan masalah ini, dapat diketahui bagaimana hubungan ekonomi politik antara Indonesia dengan Cina tahun 2014-2019. Pembatasan masalah ini digunakan sebagai salah satu fokus penulis dalam meneliti permasalahan.

D. Tujuan Penelitian

Dari masalah yang telah di rumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan ekonomi politik Indonesia dengan Cina tahun 2014-2019.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat menjadi pelengkap ilmu politik dalam bidang ekonomi politik. Dimana akhir-akhir ini fenomena ekonomi politik dalam ruang lingkup makro sedang banyak terjadi, maka sewajarnya bila penelitian ekonomi politik tingkat makro ini menjadi daya tarik mahasiswa yang akan menyusun tugas akhir. Di satu sisi, penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan khasanah kajian teori-teori sosial dan politik terutama yang berkaitan dengan penelitian ekonomi politik tingkat makro.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak. Dalam penelitian ini peneliti memaparkan informasi, data-data dan bukti-bukti empirik dari hasil kajian pustaka yang telah disusun secara sistematis sehingga

memudahkan bagi semua pihak untuk memahami, mengkaji dan mempelajari ulang penelitian yang terkait dengan hubungan ekonomi politik Indonesia dengan Cina.

